

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU RUPAWAN JONI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 853106

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.363.115.000

1. Tanah Seluas 6137 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.656.990.000
2. Tanah Seluas 1124.5 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 281.125.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1700 m2/202.5 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 425.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.750.000

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 97.420.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.650.099**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.553.935.099



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.553.935.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.